

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Adapun kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis merupakan buah penafsiran terhadap analisis penelitian penulis mengenai “Peristiwa Tanjung Priok Dalam Pandangan Surat Kabar *Kompas* dan *Berita Yudha* 1984-1987” Sedangkan saran dari penulis merupakan masukan yang disampaikan penulis kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan kajian masalah dalam penelitian yang penulis lakukan.

5.1. Kesimpulan

Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 telah menjadi catatan sejarah buruk pada masa pemerintahan Orde Baru. Indonesia yang sedari dulu menjunjung tinggi keberadaan Hak Asasi Manusia pada akhirnya, hal tersebut terabaikan dengan meletusnya insiden ini. Kejadian ini nyatanya dapat dikatakan sebagai peristiwa politik dan agama yang tidak bisa dipisahkan. Politik Orde Baru membuat umat Islam dan partai Islam yang berada dalam pemerintahan Orde Baru termarginalkan. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya kemerosotan angka pemilih kepada salah satu partai Islam di Pemerintahan Orde Baru. Sehingga hal tersebut, jelas akan berdampak bagaimana perjuangan partai Islam di pemerintahan. Salah satunya adalah, partai Islam tersebut akan kesulitan dalam memperjuangkan apa-apa saja yang hendak ingin dicapai. Hal lainnya juga, terkait dengan perpecahan yang terjadi dalam tubuh intern partai menambah akumulasi frustrasi golongan Islam tersebut. Kondisi ini, semakin parah dengan penetapan Pancasila sebagai asas tunggal kemudian berbagai larangan yang erat dengan Islam, salah satunya pelarangan penggunaan Jilbab. Kondisi ekonomi yang sangat minim dan genting masyarakat Priok juga tak bisa dipisahkan dari meletusnya peristiwa tersebut. Mengkritisi jalannya pemerintahan tersebut, terus dilakukan oleh

masyarakat Priok dengan berbagai cara seperti melalui pengajian, ceramah-ceramah yang kerap menyinggung jalannya pemerintahan hingga tersebar poster-poster propaganda yang ditunjukkan kepada pemerintah yang pemerintah anggap kerap mengandung unsur SARA.

Hal tersebut memang menyulut emosi dari pemerintah. Oleh karenanya, berbagai usaha juga dilakukan agar kemudian bisa meredam dan tetap bisa menciptakan stabilitas nasional. Stabilitas nasional merupakan senjata yang dirasa ampuh pemerintah ketika terdapat golongan atau kelompok yang berusaha mengganggu jalannya pemerintahan. Akan tetapi, terdapat beberapa tindakan untuk meredam tersebut yang dinilai berlebihan. Salah satunya, beredarnya rumor bahwa Sersan Hermanu yang masuk ke dalam Musholla tanpa melepas sepatunya. Sontak, hal ini membuat kecewa banyak pihak di kawasan Priok. Pemberitaan tersebut langsung menyebar luas di kalangan masyarakat Priok, hal ini memperparah citra pemerintah dalam pandangan warganya. Insiden tersebut membuat rentetan panjang terjadi pasca beredarnya rumor tersebut, mulai dari perselisihan yang semakin memanas diantara kedua belah pihak hingga berujung pada pembakaran motor milik petugas dan penangkapan empat orang Priok yang diduga sebagai provokator. Melihat ini, mereka terus berusaha membebaskan empat orang tersebut. Namun, sulit dilakukan hingga akhirnya terjadi Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 yang banyak orang mengatakan sebagai peristiwa berdarah. Peristiwa ini merupakan kejahatan yang sangat keji, banyak korban jiwa berjatuhan, kerugian materi juga menjadi dampak yang tercipta. Warga sipil yang tidak bersenjata menjadi korban dalam kejadian ini. Terdapat penyalahgunaan wewenang pemerintah dalam kasus ini sehingga pelanggaran Hak Asasi Manusia tak bisa dipisahkan dari peristiwa ini. mau tidak mau, pengaruh sosial ekonomi menjadi penyumbang terjadinya tumpah darah di kawasan Priok ini. Berlatar belakang masyarakat yang berbeda dari berbagai daerah untuk mengadu nasib ke Ibukota termasuk juga kondisi ekonomi yang tidak sejalan dengan harapan membuat warga mudah tersulut akan emosi ditambah dengan

berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mereka rasa tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan.

Pemerintah dengan cepat melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Langkah pertama dalam mengungkap siapa dibalik peristiwa ini adalah memasukkannya dalam proses peradilan. Banyak pihak yang ditangkap karena diduga mempunyai keterlibatan dalam Peristiwa ini, termasuk juga mendengarkan keterangan para saksi-saksi. Nyatanya, proses peradilan memang cukup panjang hingga diputuskannya dalam peradilan pihak-pihak yang dianggap bersalah dan bertanggungjawab dalam meletusnya Peristiwa Tanjung Priok ini. Cukup lama kasus ini diredam dan tertutupi oleh pemerintahan. Hingga akhirnya ketika era Reformasi di Indonesia berdiri, barulah beberapa pihak yang merasa dirugikan atas kejadian ini angkat bicara. Mereka mendatangi Komnas HAM untuk membuka kembali catatan dan dokumen mengenai peristiwa ini dengan harapan bisa mendapatkan keadilan dengan apa yang telah menimpa mereka. Pemerintah era Reformasi memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar dalam mengungkap kasus ini. Namun, dalam perjalanan pengungkapan kasus ini, pemerintah Reformasi mengalami kesulitan dalam mengungkap insiden ini. Hal yang paling penting agar bisa mengungkap insiden ini adalah keberadaan dokumen-dokumen atau catatan yang bisa menunjukkan data yang akan menjadi fakta tetapi Komnas HAM beserta pemerintah kesulitan dalam menemukan hal ini. Alasannya adalah beberapa dokumen sudah dimusnahkan sehingga sulit untuk bisa didapatkan.

Hal ini yang kemudian menjadikan pandangan masyarakat atau para korban kepada pemerintah Orde Baru semakin buruk dengan memusnahkan berbagai dokumen yang penting dalam mengungkap peristiwa ini. Peristiwa Tanjung Priok ini nyatanya telah menjadi perhatian dari berbagai pihak. tak hanya dari pemerintah Reformasi saja akan tetapi juga dari media massa. Media massa memiliki peran yang cukup besar terutama surat kabar untuk mengubah pandangan atau paradigma para pembacanya paling tidak melalui dua hal. Pertama, pemberitaan lewat artikel-artikel yang dimuatnya serta yang kedua adalah pandangan dari surat kabar tersebut yang

biasanya berbentuk paling tidak dalam tiga wujud yakni tajuk rencana, karikatur serta catatan pojok. Hal-hal tersebut juga termuat dalam dua surat kabar yang lahir dan berkembang di masa Orde Baru yakni *Kompas* dan *Berita Yudha*.

Kompas dan *Berita Yudha* ikut serta dalam menyampaikan pemberitaan mengenai Peristiwa Tanjung Priok ini, keduanya memiliki konsentrasi yang berbeda dalam menyampaikan informasi kepada para pembacanya. *Kompas* secara konsisten memberitakan pemberitaan mulai dari latar belakang, proses peradilan hingga bagaimana tindak lanjut pemerintah dalam menyikapi peristiwa ini dilakukan menjadi pemberitaan yang terus dimuat dalam surat kabar tersebut. Sementara *Berita Yudha* lebih berkonsentrasi dalam memberikan informasi terkait dengan jalannya persidangan yang cukup lama bergulir yang membuat banyak nama menjadi terdakwa dan tersangka dalam kasus tersebut. Hal tersebut karena menjelang Reformasi *Berita Yudha* sudah mulai menurun terkait dengan penerbitannya sehingga membuat fokus pemberitaannya pun berkurang dalam memandang berbagai peristiwa. Keduanya juga dalam artikel pemberitaannya menghadirkan para narasumber untuk dimintai pendapatnya mengenai peristiwa tersebut. Hal lain juga yang menjadi bagian dari surat kabar tersebut adalah bagaimana keduanya memperlihatkan sikap dalam menjalankan fungsinya sebagai pers untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Biasanya hal tersebut dituangkan dalam sebuah pandangan. *Kompas* dan *Berita Yudha* memiliki poin yang berbeda dalam menyampaikan pemberitaan serta pandangannya yang dituangkan paling tidak dalam tiga bentuk yakni Tajuk Rencana, Catatan Pojok serta Karikatur. *Kompas* lebih banyak membicarakan persoalan komunikasi, kebebasan pers dibandingkan kampanye meningkatkan kewaspadaan pasca Insiden Tanjung Priok di tahun 1984 sebagaimana yang dilakukan oleh *Berita Yudha*. Hampir semua tajuk rencananya dimanfaatkan *Kompas* dengan menggabungkan antara Insiden Tanjung Priok dengan kebebasan pers yang terus diperjuangkan. *Kompas* cenderung berusaha memperingati pemerintah bahwa dengan berbagai kejadian seperti Insiden Priok, teror yang terjadi setelah Priok ini karena kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan rakyatnya.

Kompas melihat bahwa dengan terus menyuarakan keberadaan kebebasan pers dalam Insiden Priok ini bisa dijadikan sebagai sikap untuk mengevaluasi jalannya pemerintah tersebut. Kebebasan pers harus di hadirkan dan harus bisa dinikmati oleh kalangan pers, karena hal tersebut telah dijamin oleh Undang-undang. Selain itu, *Kompas* memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah akan suatu insiden serta kebebasan pers yang bisa menjembatani antara pemerintah dengan rakyatnya. *Kompas* dalam menyampaikan pandangannya berusaha menjaga konsistensi misi yang dimiliki sebagai surat kabar independen yang tidak memihak mana pun. Meskipun dalam pengemasan segi bahasa kerap kali dijumpai redaksi yang sangat halus dalam memberikan kritikan kepada pemerintah.

Sedangkan *Berita Yudha*, dalam pemberitaannya serta pandangannya, tidak sedikitpun menyinggung kurangnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sempurnalah sudah tugas pemerintah. Dalam berbagai pandangannya mengenai Tanjung Priok, pandangannya cenderung pada kampanye-kampanye untuk tetap tenang karena pemerintah dengan cepat bisa mengatasi kejadian tersebut serta imbauan dari pemerintah kepada rakyatnya untuk tetap hati-hati dan waspada bahwa kaum ekstremis sudah mulai beraksi di Indonesia untuk mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Dalam berbagai tajuknya, hampir memandang tak ada sangkut-pautnya dengan kurang bekerjanya pemerintah.

Alasan dari *Berita Yudha* cenderung menyampaikan pandangan tersebut, karena *Berita Yudha* jelas di awal berdirinya merupakan surat kabar dibawah komando Militer. Sehingga hal tersebut wajar bila terjadi. Corong pemerintah, suara pemerintah menjadi ciri dari surat kabar *Berita Yudha* ini. Kewaspadaan serta menciptakan keharmonisan yang tetap harus dibina antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi hal lain yang disampaikan oleh *Berita Yudha* di setiap pandangannya.

Dari segi bahasa yang digunakan, *Kompas* meramu bahasa yang lugas, sopan serta terkesan bermain aman. Maka berbeda dengan *Berita Yudha* yang meramu bahasanya sangatlah halus terhadap pemerintah, namun keras kepada golongan

tertentu yang berusaha mengancam Indonesia dengan berbagai aksinya. Sepintas bila membaca tajuk rencana *Berita Yudha* dan bila kita berpatokan pada Undang-undang pers yang menyebutkan sebagai alat kontrol terhadap pemerintah, maka kita tidak akan terasa bahwa itu adalah sebuah tajuk rencana, yang memiliki definisi sebagai salah satu wadah untuk menyampaikan pandangan salah satunya adalah kritik. Cenderung pada penyambung lidah pemerintah terhadap rakyatnya, itulah yang dilakukan oleh *Berita Yudha*.

Sebetulnya dalam menyampaikan berbagai pandangan tak hanya terlihat dari tajuk rencana dan karikatur saja. Akan tetapi, ada hal lain yang kemudian juga menjadi ciri khas dari surat kabar Indonesia yakni catatan pojok. Bagian ini juga menjadi bagian penting untuk menyampaikan berbagai pandangan. Hal tersebut juga dimiliki oleh *Kompas* dan *Berita Yudha*. *Kompas* dengan “Mang Usil” serta *Berita Yudha* dengan nama “Mang Bidik” nya. Biasanya dalam catatan pojok, pandangan disampaikan secara tegas dan lugas dan terkadang terkesan menyindir apa yang menjadi persoalan.

Kedua surat kabar ini memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menyampaikan berbagai pandangannya. Ciri khas tersebut di latarbelakangi dari mana surat kabar ini berada dan tumbuh. Meskipun berbeda dalam fokus atau *framing* pemberitaannya, akan tetapi kedua surat kabar ini memiliki tujuan untuk Indonesia bisa lebih baik lagi, dengan memberikan berbagai pandangannya yang dikemas secara berbeda sesuai dengan gaya penulisan dan penyampaian masing-masing.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII dalam Kurikulum 2013, konten ini dapat menunjang Kompetensi Dasar nomor (3.5) yaitu “Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru” kemudian nomor (4.5) yakni

“Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis”. Kajian mengenai masa Orde Baru dan Reformasi masih belum mendalam dibahas. Sehingga penelitian ini dapat membantu siswa untuk menganalisis lebih lanjut hal-hal lain, khususnya dalam bidang politik dan keberadaan media massa. Pembahasan ini belum banyak dibahas dalam buku sejarah di sekolah. Sehingga diharapkan penelitian ini menjadi referensi dalam menambah wawasan sejarah siswa pada masa reformasi di Indonesia.

2. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Informasi dan Komunikasi agar tetap memperhatikan keberadaan media massa di Indonesia. Terlebih keberadaan pers ini merupakan keharusan untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan perhatiannya kepada media massa untuk terus mewadahi aspirasinya dengan ketentuan Undang-undang yang ada. Dengan demikian, akan ada keselarasan yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya dengan keberadaan media massa.
3. Bagi Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber tambahan penelitian serta bacaan untuk mengetahui sejarah Orde Baru terutama dalam berbagai kebijakan mengenai media massa.
4. Bagi peneliti selanjutnya tentu masih banyak kajian masalah yang bisa diangkat yang dilihat dari pandangan surat kabar terhadap suatu peristiwa. Peneliti selanjutnya bisa melakukan kajian masalah ketika masa Soeharto telah usai, apakah pandangan surat kabar terhadap suatu peristiwa semakin tajam atau justru cenderung melemah dalam menjalankan kritik sosial terhadap jalannya pemerintah. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap media massa pada masa awal Reformasi juga bisa dijadikan sebagai topik yang menarik. Mengingat masa Orde Baru banyak

menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah sehingga di awal Reformasi menjadi beban berat bagi B.J. Habibie. Sehingga dengan demikian, strategi politik, kemudian berbagai kebijakan bisa menjadi topik yang menarik untuk dikaji.

Demikian kesimpulan dan juga saran yang penulis buat, semoga dengan apa yang dituliskan bisa bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia untuk terus memperoleh berbagai informasi serta bisa meningkatkan pembelajaran di sekolah.